



Kejati Buru

Koruptor Bansos

■ Dua Jam Geledah BPKAD Pontianak
 ■ Sutarmidji Janji Pemkot Kooperatif

” Bansos Kota Pontianak yang lama, 2006, 2007, dan 2008. Indikasinya, tidak digunakan sesuai peruntukan. ”

RESI NAPITUPULU

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar



TRIBUN/DOK



TRIBUN/DOK

” Selama saya menjabat, Bansos transparan. Melalui transfer ke rekening penerima dan diumumkan ke media. ”

SUTARMIDJI

Wali Kota Pontianak

PONTIANAK, TRIBUN - Selama dua jam Satuan Khusus (Satgas) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, menggeledah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Rabu (19/2).

Pengeledahan dilakukan untuk mencari bukti dugaan

tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2006, 2007, dan 2008.

■ Bersambung ke Hal. 7



Kejati Buru Koruptor Bansos

Sambungan Hal. 1

Kepala Kejati Kalbar, Resi Anna Napitupulu, mengungkapkan ada indikasi kuat penyaluran dana Bansos tidak sesuai ketentuan.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, pun mempersilakan kejaksaan mengusut tuntas kasus dana Bansos yang diduga merugikan negara Rp 16 miliar tersebut. Sementara dr Buchary A Rachman, yang menjabat Wali Kota Pontianak saat itu, memilih bungkam.

"Tidak sesuai Perda (Peraturan daerah). Nanti dulu, tunggu saja. Setelah yang satu ini, baru mantab beritanya," kata Resi Anna Napitupulu saat ditanya *Tribun* alasan penggeledahan BPKAD Kota Pontianak.

Resi menegaskan, sepanjang ada data dan informasi tentang dugaan korupsi, pihaknya akan tetap memprosesnya. "Yang sekarang kita proses, Bansos di Kota Pontianak yang lama 2006, 2007, dan 2008. Indikasinya, tidak digunakan sesuai peruntukan. Itu saja kuncinya," tegas Resi.

Karena itulah, penggeledahan dilakukan dengan maksud memperoleh data dan informasi, siapa yang bertanggung jawab mengelola Bansos dalam tiga tahun tersebut. "Ini sedang diperiksa di sana. Nah, ini cari data informasi dulu, penggeledahan hari ini (kemarin). Supaya gak error, kalau error person, kan susah," jelasnya.

Saat didesak siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas dana Bansos tersebut, Resi enggan mengungkapkannya. Ia meminta agar bersabar menunggu hasil pemeriksaan dan saksi-saksi. "Nanti dulu. Kita sekarang geledah dulu. Baru nanti dapat data dokumen, selanjutnya pemeriksaan data dan saksi-saksi. Sesudah periksa saksi, baru periksa tersangka. Dari semua barang bukti itu, baru nanti tahu siapa tersangka," tegas Resi.

Mantan Kejati Banten ini juga tak banyak berkomentar saat ditanya siapa yang melaporkan kasus ini ke kejaksaan. "Masyarakat pencari keadilan," ujarnya sambil tertawa kecil.

Soal kerugian negara, ia menuturkan belum menghitungnya karena baru tahap validitas data di BPKAD Kota Pontianak. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Didik Istiyanta, menambahkan proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya karena ada laporan dari masyarakat. Ter-

masuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar yang menemukan kerugian Rp 16 miliar. "Penggeledahan yang dilakukan untuk melengkapi dokumen pemeriksaan penggunaan dana Bansos tahun 2006, 2007, dan 2008 yang diduga fiktif," ujar Didik.

Berkas 30 Dus
Didik menjelaskan dana Bansor pada 2006 sebesar Rp 42 miliar, 2007 senilai Rp 37 miliar, dan pada 2008 sebesar Rp 37 miliar. "Tetapi dari jumlah itu, tidak seluruhnya pemberian Bansos fiktif. Untuk itulah, kami kembali melakukan penyitaan berkas untuk mengetahui besaran nilai yang diduga dikorupsi dan memproses kasus ini hingga ke meja hukum," tegasnya.

Sebelum melakukan penggeledahan, Didik mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi yang diduga mengetahui aliran dana Bansos tersebut. "Sudah ada yang kita lakukan pemeriksaan. Dalam hal ini, Bendahara pemegang kas 2006, 2007, dan 2008. Ada dua orang. Inisialnya ID dan AE. Keduanya masih sebatas saksi. Status mereka masih PNS," ujarnya.

Didik sendiri memimpin langsung proses penggeledahan di BPKAD Kota Pontianak. Ia membawa sekitar delapan orang tim dari Kejati Kalbar. Mereka tiba di Kompleks Kantor Wali Kota Pontianak, sekitar pukul 09.00 WIB.

Para jaksa tersebut tiba menggunakan empat mobil. Mereka memakai rompi hitam dengan list merah dengan tulisan di punggung *Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi*. Sebelum melakukan penggeledahan, Didik bertemu Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

Tak berapa lama kemudian, Didik dan tim langsung bergegas menuju Kantor BPKAD Kota Pontianak yang berada di kompleks Kantor Wali Kota Pontianak dan melakukan penggeledahan di ruang arsip.

Beberapa menit berada di ruang Wali Kota Pontianak, Didik bersama tim langsung menuju Gedung Kantor BPKAD Kota Pontianak, yang lokasinya masih di Kompleks Kantor Wali Kota Pontianak.

Didik kemudian memasuki Ruang Kerja Kepala BPKAD Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang. Dari ruangan Rudi, Didik bersama tim masuk Ru-

ang Arsip BPKAD. Mereka langsung menggeledah ruangan dan terlihat memilah-milah arsip.

Buchary Bungkam
Bahkan tim Kejati Kalbar itu, harus duduk melantai untuk menemukan data-data yang dibutuhkan. Proses penggeledahan tersebut disaksikan langsung Rudi Enggano Kenang dan sejumlah staf BPKAD. Dua jam kemudian, tim Kejati Kalbar, selesai melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, Didik menyebut, pihaknya menyita 30 dus dokumen terkait dana Bansos.

Dokumen-dokumen itu dibawa menggunakan dua unit mobil. "Yang kita bawa ini, yang mengajukan proposal sekian banyak. Ada 30 kotak kardus. Ini yang kita periksa," tegas Didik.

Soal langkah selanjutnya yang akan dilakukan kejaksaan, Didik menegaskan semua yang diduga terlibat akan dimintai keterangan. Dalam waktu dekat, Buchary A Rachman dan Hasan Rusbini, yang menjabat Wali Kota Pontianak dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, saat itu, akan dimintai keterangan.

Menanggapi rencana pemanggilan tersebut, Buchary A Rachman, enggan menanggapi. Ditemui *Tribun* di ruang kerjanya di Lantai II, Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, ia irit bicara. "Saya orang sipil sekarang. Itu urusan hukum," kata Buchary yang ditemui usai Salat Ashar, sekitar pukul 15.45.

Tak lama, Buchary yang menjabat Wali Kota Pontianak dua periode ini, meninggalkan ruang kerjanya. Buchary memang aktif di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura sebagai direktur. "Sudah, ya," ujarnya sambil berlalu.

Sementara mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, belum bisa dikonfirmasi. Rumahnya yang terbilang megah di kawasan Jl Gusti Hamzah Pontianak, sepi. Di garasi rumah terparkir *City Car* warna Merah dan sebuah motor besar.

Sementara di halaman terparkir dua unit sepeda motor. *Tribun* hanya bertemu keponakan Hasan Rusbini, yang kebetulan sedang menginap. "Bapak tidak ada di rumah. Bapak ke Jakarta. Sudah dari tadi pagi," kata perempuan berusia sekitar 28 tahun tersebut.

Komitmen Midji
Ia menjelaskan pamannya

itu sedang ada urusan partai di Jakarta. Sejak pensiun sebagai PNS, Hasan Rusbini, memang aktif di sebuah partai politik dan ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Bagaimana respon Wali Kota Sutarmidji? Ia mempersilakan Kejati Kalbar mengusut dugaan korupsi dana Bansos 2006, 2007, dan 2008. Midji menegaskan komitmennya membantu proses penyidikan.

"Karena pihak Kejati Kalbar memerlukan dokumen-dokumen itu, sehingga saya persilakan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen yang diduga pemberian Bansos fiktif," kata Midji.

Menurutnya, Pemkot Pontianak, siap membantu proses penyidikan. "Apapun yang diperlukan pihak Kejati, kami siap membantu. Saya, waktu itu, menjabat Wakil Wali Kota Pontianak. Sekretaris Daerah Hasan Rusbini dan Wali Kota Pontianak, Buchary Abdurrahman. Selaku wakil, saya tidak punya wewenang mencairkan dana Bansos," papar Midji.

Ia menyatakan, proses pencairan dana Bansos saat itu, untuk 2006, pencairannya ada di Sekretariat Daerah. Sementara pada 2007 dan 2008, sudah di BPKAD Kota Pontianak. Midji menegaskan, selama ia menjabat Wali Kota Pontianak, pencairan dana Bansos sudah transparan.

"Selama saya menjabat, pencairan Bansos sudah transparan. Semuanya melalui transfer ke rekening penerima dan diumumkan ke media. Kalau sebelumnya, saya tidak mengetahui persis, karena memang tidak terlibat dalam hal itu," paparnya.

Midji yang menjabat wali kota untuk periode kedua ini, mengatakan sebagai kepala daerah, ia harus mendorong dan menekankan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengaku siap jika dirinya dibutuhkan untuk memberikan keterangan. "Kalau memang saya diperlukan memberikan keterangan, saya siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi," ujarnya.

Sementara Kepala BPKAD Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang, tidak banyak berbicara soal penggeledahan yang dilakukan di kantornya. Rudi mengaku, informasi terkait kasus ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada Wali Kota Sutarmidji. (isf/qky/rhd)